

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN sendiri memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan mendukung pembangunan infrastruktur. Keberhasilan BUMN tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, melainkan juga dari sejauh mana BUMN mampu memenuhi kepentingan publik, memajukan perekonomian nasional, dan berkontribusi dalam mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi negara (Dewi, 2021).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, tidak luput dari berbagai permasalahan, termasuk praktik manajemen laba. Fenomena manipulasi laba ini seringkali dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap BUMN. Manajemen laba tidak bisa terlepas dari adanya masalah *agency*, masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (*agent*). Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini memunculkan asimetri informasi yang memungkinkan manajemen

melakukan praktek akuntansi dengan orientasi laba untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Dewi, 2021).

Manajemen laba adalah perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan manajemen melalui kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan tertentu (Saraswati *et al.*, 2024). Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat laba yang akan ditampilkan kepada pemegang saham. Manajemen laba merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*), karena pada dasarnya manajemen laba adalah perilaku seorang manajer yang mempermainkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya (Shinthia & Arisman, 2023).

Manajemen laba menjadi suatu isu yang menarik untuk diteliti mengingat di masa sekarang ini masih banyak kasus terkait tindakan kecurangan manajer dalam suatu perusahaan. Salah satu contoh kasus manajemen laba di Indonesia adalah perusahaan PT Waskita Karya Persero yang mencuat pada tanggal 4 Juli 2023. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun 2008. Direktur Utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp. 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004-2008 dengan memasukan proyeksi pendapatan proyek multitalahun ke depan sebagai tahun tertentu, dimana direksi sebelumnya berperan dalam memerintahkan dan menyetujui pencairan dana *Supply Chain Financing* (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

Dokumen palsu itu digunakan untuk membayar utang perusahaan yang ternyata diketahui belakangan merupakan proyek pekerjaan fiktif (Silviyana *et al.*, 2023).

Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelumbungan aset di tahun 2005 sebesar Rp 5 miliar. Nilai Rp 5 miliar tersebut terdiri dari dua proyek yang sedang berjalan, proyek yang pertama adalah proyek renovasi Kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar Rp 13,8 miliar. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai Rp 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar Rp 33.998.000.000 dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progress tersebut sebesar Rp 2 miliar. Saldo tersebut masih *outstanding* sampai dengan akhir tahun 2008 (Rizal *et al.*, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan BUMN, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang bermasalah dan terduga di manipulasi. Tiko memaparkan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sempat membukukan laba pada tahun 2017-2018 hingga mencapai Rp 4,2-4,6 triliun. Namun, pada saat pandemi terjadi, yaitu tahun 2020, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. melaporkan keuangannya mengalami kerugian atau negatif Rp 9,3 triliun, jadi ini memang signifikan dari laba Rp 4,2-4,6 (triliun) setelah covid turun jadi minus Rp 9,3 (triliun). Studi kasus yang ada terlihat bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk. mengalami perubahan signifikan dalam kinerja keuangan selama beberapa tahun terakhir. Laba yang tinggi pada tahun 2017-2018

mencerminkan performa yang baik, tetapi situasi itu berubah drastis saat pandemi pada tahun 2020. Keganjilan yang terlihat dalam perubahan yang sangat drastis dari laba yang signifikan menjadi rugi yang cukup besar selama tahun pandemi. Penurunan laba dari Rp 4,2 sampai 4,6 triliun menjadi rugi Rp 9,3 triliun menunjukkan dampak negatif yang signifikan dari situasi pandemi terhadap bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya periode Juli 2022 hingga saat ini, Destiawan Soewardjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi (Dinarjito, 2022).

Maraknya penyimpangan yang terjadi pada perusahaan ternyata dapat disebabkan karena adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Salah satu upaya untuk meminimumkan praktik manajemen laba yaitu melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan upaya untuk membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan responsibilitas dalam mengelola sebuah perusahaan dan memonitoring kinerja manajemen untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan serta memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga dapat menurunkan praktik manajemen laba (Megawati *et al.*, 2023). Beberapa mekanisme *Good Corporate Governance* antara lain diwujudkan dengan adanya dewan direksi. Dewan direksi merupakan sistem manajemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance*. Selain itu, dewan direksi juga dipandang sebagai mekanisme pemantau yang dapat meringankan konflik agensi dengan membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi yang terjadi dalam Perusahaan (Darmayanti *et al.*, 2021). Perspektif

dewan direksi dapat dilihat dari jumlah anggota dewan direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, *gender* dewan direksi, koneksi politik dewan direksi, dan narsistik dewan direksi.

Jumlah anggota dewan direksi merupakan ukuran dewan direksi dalam suatu perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang besar memberikan jangkauan yang besar akan keahlian dan alternatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat menurunkan praktik manajemen laba (Rinta, 2021). Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Karina *et al.* (2021) dan Setianingsih *et al.* (2024) yang memperoleh hasil bahwa jumlah anggota dewan direksi berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, sedangkan hasil penelitian Wulandari *et al.* (2023) memperoleh hasil bahwa jumlah anggota dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Lestari *et al.* (2022), Awwaliyah *et al.* (2024) dan Fajriana (2023) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Latar belakang pendidikan dewan direksi merupakan modal intelektual yang dimiliki oleh seorang dewan direksi dari pengalaman belajar yang sudah dilalui (Andira *et al.*, 2022). Dewan direksi dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi akuntansi dan keuangan dapat melakukan pengelolaan dan pengawasan manajemen perusahaan dengan lebih efisien dan lebih kompeten (Andira *et al.*, 2022). Hal ini disebabkan karena dewan direksi ini telah dibekali dengan pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang menunjang lingkup pekerjaannya sehingga akan lebih memahami pola manajemen laba di perusahaan dan dapat mencegah praktik manajemen laba (Pribadi *et al.*, 2020). Menurut Darmayanti (2021), Megawati *et al.* (2023), dan Desrina *et al.* (2022), latar

belakang pendidikan dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Sari *et al.* (2022) memperoleh hasil bahwa latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Gender merupakan karakteristik yang mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan wanita, dimana hal ini dapat mempengaruhi sikap kerja seseorang (Budhyarto *et al.*, 2023). Laki-laki dan wanita memiliki perbedaan, laki-laki cenderung lebih tertarik pada kondisi yang berisiko dan menantang serta cenderung terbatas dalam manajemen keputusan yang diambil atas proses informasi yang diterima, sedangkan wanita cenderung bekerja lebih teliti dan rapi dalam menyelesaikan tugasnya karena wanita dinilai memiliki sikap yang lebih etis serta mampu menurunkan praktik manajemen laba (Pribadi *et al.*, 2020). Menurut Fitroni *et al.* (2022) dan Setyaningsih *et al.* (2024), dewan direksi wanita memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Megawati *et al.* (2023), Hasnawati *et al.* (2023), Budhyarto *et al.* (2023) dan Cahya *et al.* (2024) memperoleh hasil bahwa keberagaman *gender* dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Koneksi politik merupakan hubungan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan dengan individu-individu yang berwenang dalam sistem politik, seperti pemerintah, partai politik, atau pejabat publik. Suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang saham utama atau salah satu pemimpin perusahaan adalah seorang menteri, anggota parlemen, atau memiliki hubungan erat dengan politisi (Chandra, 2021). Hubungan ini dapat terbentuk melalui berbagai cara, mulai dari kepemilikan saham oleh politisi, hingga adanya

hubungan bisnis yang saling menguntungkan (Kesaulya *et al.*, 2023). Koneksi politik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait dengan kebijakan publik yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dunia bisnis, seperti mendapat fasilitas perolehan sumber daya penting dan dukungan pemerintah sehingga dewan direksi yang memiliki koneksi dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba (Kesaulya *et al.*, 2023). Menurut Auliana (2023) dan Hasan *et al.* (2024), koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti *et al.* (2021), Saraswati *et al.* (2024) memperoleh hasil bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan penelitian yang dilakukan oleh Supatmi *et al.* (2022) memperoleh hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Narsistik didefinisikan sebagai keyakinan yang berlebih tentang kemampuan dan pencapaian diri sendiri, fokus pada penghargaan pribadi dan cenderung untuk mengejar strategi berisiko karena kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga memicu perilaku kurang etis di dalam sebuah perusahaan (Sayekti *et al.*, 2021). Individu dengan kepribadian narsistik lebih menonjolkan sifat egois, dominan, dan mengedepankan kekuasaan, serta sering menggunakan cara-cara agresif, termasuk manipulasi, untuk mencapai tujuan pribadi mereka, sehingga dewan direksi yang memiliki perilaku narsistik dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba (Saputra *et al.*, 2024). Menurut Prayogi *et al.* (2023), narsistik berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan hasil tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Shinthia *et al.* (2023) yang memperoleh hasil bahwa narsistik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Menurut Ivone *et*

al. (2024) dan Anggraeni *et al.* (2023), narsistik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya fenomena manajemen laba pada perusahaan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam pelaporan keuangan perusahaan sehingga keuangan perusahaan terlihat baik menurut pihak investor, hal ini menarik untuk diteliti karena dapat memberikan suatu gambaran tentang perilaku manajer dalam pelaporan kegiatan usahanya dan adanya inkonsistensi hasil penelitian–penelitian sebelumnya mendorong dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah anggota, latar belakang pendidikan, *gender*, koneksi politik, dan narsistik dewan direksi terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN yang terdaftar BEI tahun 2021-2023 guna memberikan masukan kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya dewan direksi dalam operasional perusahaan guna meningkatkan integritas laporan keuangan serta memberikan masukan kepada investor untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan investasi khususnya pada perusahaan BUMN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 2) Apakah latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 3) Apakah *gender* dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?

- 4) Apakah koneksi politik dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 5) Apakah narsistik dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis mengenai pengaruh jumlah anggota dewan direksi terhadap manajemen laba.
- 2) Untuk menganalisis mengenai pengaruh latar belakang pendidikan dewan direksi terhadap manajemen laba.
- 3) Untuk menganalisis mengenai pengaruh *gender* dewan direksi terhadap manajemen laba.
- 4) Untuk menganalisis mengenai pengaruh koneksi politik dewan direksi terhadap manajemen laba.
- 5) Untuk menganalisis mengenai pengaruh narsistik dewan direksi terhadap manajemen laba.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

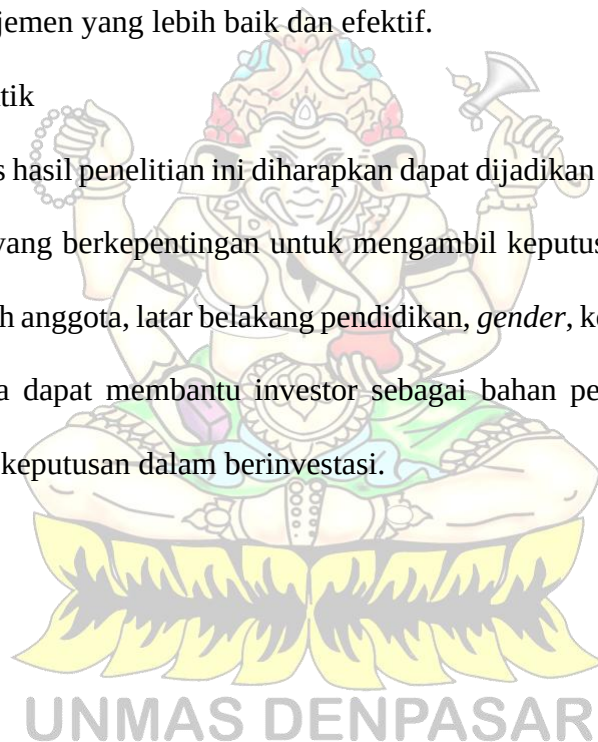
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana jumlah anggota, latar belakang pendidikan, *gender*, koneksi politik dan narsistik terhadap manajemen laba. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Manfaat teoritis ini penting untuk memperkaya pengetahuan kita tentang manajemen laba dan membantu dalam pengembangan praktik-praktik manajemen yang lebih baik dan efektif.

2) Manfaat Praktik

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan jumlah anggota, latar belakang pendidikan, *gender*, koneksi politik, dan narsistik serta dapat membantu investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat beberapa keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada hubungan agensi terdapat hubungan kontraktual, dimana pemilik saham sebagai *principal* menunjuk dan menginginkan manajer atau *agent* untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh *principal* dalam sebuah perusahaan. Selain membahas mengenai hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, teori agensi juga dikatakan bahwa lama-kelamaan para *agent* tidak dapat lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dan cenderung untuk bertindak sesuai kepentingan *agent*. Walaupun terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, *principal* dapat menjaga atau membatasi perbedaan kepentingan dengan *agent* agar tetap pada jalur yang sama.

Jensen & Meckling (1976) menyimpulkan bahwa di dalam hubungan *principal* dan *agent* ini, pihak agen tidak selalu berperilaku sejalan dengan keinginan para *principal* hal itu dikarenakan semua pihak akan lebih berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Di dalam konflik kepentingan ini manajer sebagai agen akan lebih mempunyai informasi mengenai kondisi internal perusahaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak pemegang saham (*principal*). Adanya ketidakseimbangan mengenai informasi ini

akan memunculkan kondisi asimetri informasi. Asimetri informasi ini akan membuat pihak manajer dapat mengambil kesempatan untuk melakukan perilaku yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan menyesatkan pemegang saham. Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance* (Saraswati *et al.* 2024).

Berkaitan dengan masalah keagenan, mekanisme *corporate governance* berfungsi sebagai alat dalam mendisiplinkan pengelolaan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), salah satu struktur kelembagaan yang dapat memastikan penerapan *corporate governance* dengan baik adalah dewan direksi yang memiliki karakteristik seperti jumlah anggota dewan direksi, tingkat pendidikan dewan direksi, *gender* dewan direksi, koneksi politik dewan direksi dan narsistik dewan direksi yang dapat mengawasi tingkah laku manajer sehingga manajemen laba bisa dibatasi.

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja perusahaan dan kondisi perusahaan (Megawati *et al.*, 2023). Manajemen laba merupakan

tindakan manajemen dalam proses menyusun laporan keuangan sehingga dapat menaikkan dan menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen – komponen akrual dalam laporan keuangan. Komponen akrual dipilih karena komponen ini merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Fajriana, 2023).

Scott, (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1) *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistik untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka.

2) *Political Motivations*

Perusahaan publik mengurangi laba yang dilaporkan. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan aturan yang lebih ketat.

3) *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

4) *Pergantian CEO*

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Demikian juga dengan CEO yang kurang

berhasil memperbaiki kinerja perusahaan, mereka akan memaksimalkan laba agar tidak diberhentikan.

5) *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang *going public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

6) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor agar investor dapat menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Scott, (2000) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara:

1) *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebaskan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

2) *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3) *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4) *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5) *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba.

6) *Aggresive accounting applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7) *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

2.1.3 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk

pengawasan perusahaan (Fitroni *et al.*, 2022). Dewan direksi merupakan aspek yang mempengaruhi mekanisme *corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Dewan direksi termasuk dalam organ perusahaan yang menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan yang menentukan kebijakan atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek (Putri, 2024).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Bab 2 Pasal 12, dewan direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab atas emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik itu sendiri berdasarkan anggaran dasar yang ditetapkan perusahaan.

1) Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan tujuan dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian Membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab direksi. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap akhir tahun buku.

2) Tanggung jawab Direksi

Setiap anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian emiten atau perusahaan publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan publik apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan emiten atau perusahaan publik. Anggota direksi tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian dan mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3) Wewenang Direksi

Direksi berwenang mewakili emiten dan perusahaan publik di dalam dan di luar pengadilan. Anggota direksi tidak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila terdapat perkara di pengadilan antara emiten atau perusahaan publik dengan anggota direksi yang bersangkutan. Anggota direksi yang berkepentingan yang berkepentingan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Anggota direksi yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah anggota direksi yang tidak memiliki kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris didirikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.4 Jumlah Anggota

Jumlah anggota adalah total individu atau entitas yang terdaftar dalam suatu organisasi, seperti perusahaan. Jumlah anggota dapat mencakup pemegang saham, karyawan, dan pengurus yang terlibat dalam operasional dan pengambilan keputusan (Fajriana, 2023). Secara umum, jumlah anggota dewan direksi yang banyak dapat memberikan keuntungan dalam hal pengumpulan modal, keberagaman keahlian, pengelolaan dan pengawasan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Bab II Direksi Bagian Kesatu Keanggotaan yaitu:

- 1) Bab II Pasal 2 Ayat (1) Direksi emitmen atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan direksi pada pasal 2 ayat (2) 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
- 2) Bab II Pasal 3 Ayat (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ayat (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dan Ayat (3) 1 (satu) periode masa jabatan anggota direksi paling lama (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 3) Bab II Pasal 4 ayat (1) yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Dalam 5 (lima) tahun sebelumnya pengangkatan dan selama menjabat:

1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Bab II Pasal 4 Ayat (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten

atau Perusahaan Publik. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- 5) Bab II Pasal 5 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 6) Bab II Pasal 6 Ayat (1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Ayat (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat (3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- 7) Bab II Pasal 7 Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Banyaknya jumlah dewan direksi akan semakin meningkatkan kinerja dewan direksi tersebut, sehingga fungsi pengelolaan dan pengawasan semakin meningkat dan kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan terjamin sehingga dapat menurunkan praktik manajemen laba (Safitri *et al.*, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi dengan jumlah anggota yang lebih banyak maka mempunyai keberagaman pengetahuan dan keahlian yang dapat menunjang fungsi pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi memungkinkan transaksi bisnis perusahaan menjadi transparan dan pasti akan membantu keamanan dalam kepentingan perusahaan baik itu pemilik dan pemegang saham lainnya (Rinta, 2021).

2.1.5 Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seseorang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya dan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Pendidikan menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Dimana pendidikan menjadi bekal bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 2) Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kegiatan kodrat yang ada pada anak-anak agar menjadi seseorang yang dapat

mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Melalui pendidikan seseorang dapat menemukan kebahagiaan baik dalam hal menemukan pekerjaan yang baik.

- 3) Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses dari pengalaman. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses penggalan dan pengolahan pengalaman secara terus menerus.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara utuh dan mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang positif.

Menurut Lubis *et al.* (2022), semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh dewan direksi baik dalam pendidikan formal maupun non formal maka semakin tinggi pengalaman intelektual yang dimiliki. Tingkat pendidikan para anggota dewan direksi merupakan modal intelektual yang memungkinkan para anggotanya untuk lebih produktif dan memiliki motivasi lebih dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan akan lebih spesifik memilih karyawan berdasarkan atas jurusan dan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Putri, 2024). Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dari seorang dewan direksi akan berpengaruh pada level pengetahuan yang dimilikinya. Latar belakang dewan direksi yang sesuai dengan bidang perusahaan akan dapat mengelola bisnis dan mengambil keputusan lebih matang lagi daripada yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi sama sekali (Andira *et*

al., 2022). Untuk itu, latar belakang pendidikan dewan yang sesuai akan membantu perusahaan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.

2.1.6 Gender

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam peran, fungsi, hak serta tanggung jawab yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta kondisi lingkungan setempat (Lubis *et al.*, 2022). Persepsi akan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, hal tersebut dapat dilihat dari adanya keberadaan perempuan dalam suatu jajaran dewan, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang.

Keberagaman gender mengacu pada proporsi wanita terhadap pria. Pada penelitian ini berfokus pada keberadaan dewan direksi perempuan di dalam perusahaan. Keberagaman gender pada dasarnya dipengaruhi oleh sifat alami yang diyakini melekat pada pria dan wanita sebagai individu yang memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Keberagaman gender tersebut berpengaruh terhadap risiko yang diambil dewan direksi dalam membuat keputusan, hal tersebut karena keberagaman gender dapat menambah berbagai perspektif dalam pemecahan masalah (Fitroni *et al.*, 2022).

Adanya wanita dalam jajaran struktur dewan perusahaan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berisiko rendah. Hal ini dikarenakan wanita memiliki sifat yang lebih berhati-hati dan cenderung menghindari risiko, serta jauh lebih teliti dari pria. Dari sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Serta dengan adanya

wanita dalam jajaran dewan perusahaan dapat meningkatkan kinerja tim, karena semakin tersebar anggota tim akan memberikan perspektif yang lebih beragam sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang lebih efektif (Lubis *et al.*, 2022).

2.1.7 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Kurniasih *et al.*, 2022). Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika dengan cara-cara tertentu perusahaan tersebut memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Maidina *et al.*, 2020). Pemimpin perusahaan yang sering membangun hubungan pribadi dengan pejabat publik (misalnya, persahabatan, pendidikan yang sama dengan politikus dan pengalaman kerja, dan sumbangan kampanye).

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD, sedangkan konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Maidina *et al.*, 2020).

Menurut Kurniasih *et al.* (2022), perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang

berkuasa. Suatu perusahaan memiliki koneksi politik dengan pemerintah memiliki manfaat strategis seperti lebih awal mengetahui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, selain itu perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik dengan pemerintah akan lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah.

2.1.8 Narsistik

Fadjarenie *et al.* (2022) menyatakan bahwa narsistik adalah pola kemegahan, kebutuhan untuk dikagumi, dan rasa berlebihan diri yang penting. Hal ini terkait dengan pandangan diri yang positif dari sifat *agentic*, termasuk kecerdasan, daya tarik fisik, dan kekuasaan. Narsistik tidak fokus pada keintiman interpersonal, kehangatan, atau aspek positif lainnya dari hasil relasional. Sebaliknya, mereka menggunakan relasi untuk tampil populer dan sukses, dan mereka berusaha terlihat menarik, status individu yang tinggi dianggap sebagai mitra romantis. Narsis jarang mengejar komitmen ini untuk jangka waktu yang lama. Hubungan terjadi semata-mata hanya mengejar kemuliaan di mata publik.

Jumlina *et al.* (2024) menyatakan bahwa narsistik sebagai fase yang dilalui semua anak sebelum menyalurkan cinta kepada diri mereka sendiri dan orang-orang yang berarti. Narsistik membangun asumsi-asumsi mengenai keberhargaan diri mereka yang tidak realistis, sebagai hasil dari penuturan dan evaluasi yang berlebihan dari orang-orang yang signifikan selama anak-anak.

Narsistik yaitu individu yang mencintai atau mengagumi diri sendiri, kondisi psikologi yang dicirikan oleh *selfpreoccupation*, rendahnya rasa empati, dan kurangnya *self-esteem* yang tidak disadari, kepuasan erotis yang berasal dari kontemplasi atas kekaguman akan diri sendiri, khususnya sebagai bentuk fiksasi atau regresi pada tingkat perkembangan yang infantil, dan suatu atribut bagi

kejiwaan seseorang yang dicirikan oleh kekaguman akan dirinya sendiri yang melebihi kewajaran (Fadjarenie *et al.*, 2022).

Menurut Fadjarenie *et al.*, 2022), penyebab narsistik dapat dari berbagai faktor seperti faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor psikologis yaitu narsistik terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri.
- 2) Faktor biologis yaitu secara biologis gangguan narsistik lebih banyak dialami oleh individu yang orangtuanya penderita neurotik. Selain itu jenis kelamin, usia, fungsi hormonal dan struktur-struktur fisik yang lain ternyata berhubungan dengan narsistik.
- 3) Faktor sosiologis yaitu narsistik dialami oleh semua orang dengan berbagai lapisan dan golongan, terhadap perbedaan yang nyata antara kelompok budaya tertentu dan reaksi narsistik yang dialaminya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Pribadi *et al.*, (2020) yang berjudul Pengaruh Kompensasi Bonus, Pendidikan dan Komposisi *Gender* Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia periode 2010 – 2017, dengan 3 (tiga) variabel independen yakni Kompensasi Bonus, Pendidikan dan Komposisi *Gender* dewan direksi serta 1 (satu) variabel dependen yakni Manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan model *common effect*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi bonus tidak mempengaruhi manajemen laba, perbankan syariah dengan jumlah dewan direksi

perempuan memiliki kesempatan lebih untuk melakukan manajemen laba, dan pendidikan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan sama-sama menggunakan latar belakang pendidikan serta *gender* sebagai variabel independen, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan model *common effect* sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan pada perusahaan yang di teliti juga berbeda dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan Bank syariah Indonesia periode 2010 – 2017 sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Rinta (2021) yang berjudul Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas Komite Audit dan Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran dewan direksi, aktivitas komite audit, dan ukuran komite audit. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba, aktivitas komite audit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dan ukuran komite audit mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan perbedaanya penelitian sebelumnya

menggunakan Perusahaan Manufaktur dan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Feliana *et al.* (2022) yang berjudul Pengaruh Keberagaman *Gender* pada Dewan Komisaris, Dewan direksi, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kecuali sektor keuangan periode tahun 2017-2019. Dengan menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu *Gender* dan 1 (satu) variabel dependen yakni Manajemen Laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan *gender* wanita pada dewan direksi akan mempengaruhi manajemen laba, sedangkan pada dewan komisaris dan komite audit baik pria maupun wanita memiliki peluang yang sama untuk melakukan manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan *gender* dewan direksi sebagai variabel independen serta sama- sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), kecuali sektor keuangan dan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Sari *et al.* (2022) yang berjudul Pengaruh *Glass Ceiling*, Bonus, Dan Tingkat Pendidikan Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan menggunakan 3 (tiga) variabel independen yakni *Glass Ceiling*, Bonus, Dan Tingkat Pendidikan dan 1 (satu) variabel dependen yakni Manajemen Laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *glass ceiling* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan tingkat pendidikan dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan latar pendidikan dewan direksi sebagai variabel independen serta sama – sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda , sedangkan perbedaanya penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Putri *et al.* (2022) yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Praktik Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2018-2020 dengan menggunakan 1 (satu) variabel independen yakni Koneksi Politik dan 1 (satu) variabel dependen yakni Manajemen Laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dewan direksi terkoneksi politik tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan koneksi politik sebagai variabel independen serta sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan perbedaanya penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Supatmi *et al.* (2022) yang berjudul Koneksi Politik dan Praktik Manajemen Laba Riil Studi pada Industri Keuangan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2020 dengan menggunakan 1 (satu) variabel independen yakni Koneksi Politik dan 1 (satu) variabel dependen yakni Manajemen Laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan dewan direksi terkoneksi politik ditemukan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan koneksi politik sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi data panel sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda serta penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan Industri Keuangan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2020 dan penelitian saat ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan oleh Kesaulya *et al.* (2023) yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tingkat *Real Earnings Management* di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI dengan 1 (satu) variabel independen yakni Koneksi politik serta satu variabel dependen yaitu manajemen laba. Teknik Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa dewan direksi terkoneksi politik dan dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama

menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan koneksi politik sebagai variabel independen serta sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaanya, penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sementara penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Budhyarto *et al.* (2023) yang berjudul pengaruh *gender diversity, board ethnicity, board education*, dan *tenure* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020, dengan 4 (empat) variabel independen yakni *gender diversity, board ethnicity, board education*, dan *tenure* serta 1 (satu) variabel dependen yakni manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *gender diversity* dan *board education* secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba, *tenure* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, serta *board ethnicity* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen, gender dan latar belakang pendidikan sebagai variabel independen seta sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaanya, penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sementara penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Wulandari *et al.* (2023) yang berjudul Pengaruh Jumlah Dewan Direksi, Persentase Saham Publik, *Leverage*, Dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Manajemen Laba perusahaan manufaktur sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2022 dengan menggunakan 4 (empat) variabel independen yakni Jumlah Dewan Direksi, Persentase Saham Publik, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan dan satu variabel dependen yakni Manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, persentase saham publik tidak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, *leverage* memiliki pengaruh *negative* signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba dan Dewan Direksi, Persentase saham publik, *leverage*, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan jumlah anggota dewan direksi sebagai variabel independen serta Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur sektor *basic material* yang terdaftar di BEI periode 2021-2022 sementara penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Hasan *et al*, (2024) yang berjudul Pengaruh struktur GCG terhadap manajemen laba dengan Koneksi politik sebagai variabel moderasi pada perusahaan industri jasa keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 dengan menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu struktur GCG, 1 (satu) variabel moderasi yaitu koneksi politik dan 1 (satu) variabel dependen yaitu manajemen laba. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi

linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusi dan komisaris independen mempengaruhi manajemen laba dengan koefisien negatif, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran direksi tidak mempengaruhi manajemen laba. Koneksi politik memperlemah pengaruh negatif kepemilikan institusi. Koneksi politik tidak terbukti memperkuat pengaruh positif kepemilikan manajerial. Koneksi politik tidak terbukti memperlemah pengaruh negatif ukuran direksi dan komisaris independen terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan koneksi politik sebagai variabel independen serta Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya pada perusahaan industri jasa keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 sementara penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Primasari *et al* (2024) yang berjudul Pengaruh CEO Narcissism Terhadap Manajemen Laba dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 dengan menggunakan 1 (satu) variabel independen dan Manajemen Laba sebagai variabel dependen dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif antara sifat narcisistik CEO dan praktik manajemen laba, dan Tidak ditemukan pengaruh CEO yang memiliki sifat narcisistik terhadap praktik manajemen laba ketika koneksi politik dijadikan sebagai variabel moderasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama

menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan narsistik sebagai variabel independen serta teknik analisis regresi linier berganda dan pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI sedangkan perbedaanya pada penelitian sebelumnya yaitu pada tahun penelitian, dimana penelitian sebelumnya periode 2017-2020 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.

Penelitian yang dilakukan Reynaldi *et al.* (2024) yang berjudul Pengaruh Umur, *Gender*, Keaktifan, *Expertise Finance* dan Masa Jabatan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dengan menggunakan 5 (lima) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan jenis kelamin komite audit, tingkat keaktifan komite audit, pemahaman keahlian keuangan komite audit dan usia jangka waktu jabatan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan *gender* sebagai variabel independen serta teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaanya penelitian sebelumnya menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dan penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI Tahun 2021-2023.